



IDN/ANTARA

## KAMPANYE MENGURANGI SAMPAH MAKANAN

Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung melakukan aksi kampanye "Food Waste" di sebuah warung makan di Jalan Arjuna, Bandung, Jawa Barat, Senin (31/10). Aksi tersebut dilakukan terkait isu Indonesia sebagai salah satu negara pembuang sampah makanan terbesar di dunia dan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran menghargai makanan.

## LIBATKAN TNI-POLRI

# Pemkot dan Pemkab Tangerang Awasi Jam Operasional Truk Tanah

Operasi dilakukan melibatkan personel gabungan TNI-POLRI, Dishub, Satpol PP termasuk berkolaborasi dengan stakeholder pemerintah kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk melakukan pengawasan agar tak ada lagi kendaraan besar melintas tidak sesuai jam operasional yang berlaku.

**TANGERANG (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggandeng Polres Metro Tangerang Kota, Kodim 0506/TGR, dan Kodim 0510 Tiga guna meningkatkan pengawasan dan pengecekan jam operasional truk tanah, pasir dan sejenisnya.

Hal tersebut menyusul banyaknya kendaraan dengan tonase besar melintas tidak

sesuai jam operasional yang berlaku. Pengawasan tersebut dilakukan agar tak ada kemacetan yang terjadi lantaran iring-iringan truk-truk tersebut.

Selain itu aspek keselamatan berlalu lintas dan meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan. "Waktu operasional kendaraan truk tanah, pasir dan sejenisnya dengan berat 8,5 ton berlaku mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB" kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)

Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, didampingi Kapolres Metro Tangerang Kota, Senin (31/10). Menurut Wahyudi, pengawasan terhadap jam operasional dan kepatuhan truk-truk tanah dan sejenisnya, sudah diatur pemerintah kota Tangerang melalui Peraturan Walikota (Perwali) Tangerang No 93 tahun 2022 dan Peraturan Bupati (Perbup) Tangerang No 12 Tahun 2022.

"Operasi dilakukan melibatkan personel gabungan TNI-POLRI, Dishub, Satpol PP termasuk berkolaborasi dengan stakeholder pemerintah kabupaten (Pemkab) Tangerang untuk sama-sama melakukan pengawasan," katanya.

Terhadap pengemudi yang didapati melanggar langsung diberhentikan kemudian diberi imbauan untuk selanjutnya diparkirkan sementara di kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan, menunggu sampai dengan jam operasional berlaku.

"10 hari hingga satu bulan ke depan kami akan bertugas di Pos Terpadu dalam 2 shift di dua titik yakni exit tol Benda, Kota Tangerang dan perempatan Dadap, Kabupaten Tangerang," ujar Wahyudi.

Sementara itu Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho yang meninjau langsung pelaksanaan pengecekan dan pengawasan mengatakan pihaknya sangat mendukung operasi yang dilakukan pemerintah daerah yakni Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

Mengingat keluhan masyarakat baik secara langsung ke Wali Kota, Bupati dan Kapolres dan juga melalui med-sos, media online, media cetak cukup tinggi, bahkan disikapi beberapa elemen masyarakat yang melakukan unjuk rasa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah, Polri dan TNI hadir di tengah masyarakat

untuk membuat masyarakat merasa aman dan nyaman.

"Saya minta seluruh stakeholder dapat bekerjasama dengan baik dan melakukannya secara persuasif dan humanis, tidak ada giat penegakan hukum dalam pelaksanaannya, sehingga apa yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang maupun Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk tertib lalu lintas dan aspek keselamatan dapat tercipta dengan baik," ujar Zain.

Dia mengungkapkan, Polres Metro Tangerang Kota mengerahkan 115 personel gabungan guna membantu mengamankan jalannya operasi pengawasan dan pengecekan jam operasional truk-truk tersebut. "Personel kita tempatkan di dua titik pengawasan dalam Pos Terpadu yakni di exit tol Benda, Kota Tangerang, wilayah hukum Polsek Benda dan Pos terpadu perempatan Dadap, wilayah hukum Polsek Teluknaga," pungkaskan Zain. ● pp

## Perbaikan Jalan Bikin Macet Jalan Imam Bonjol Tangerang

**TANGERANG (IM)**- Kemacetan parah terjadi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Senin (31/10). Antrian para pengendara yang hendak melintasi kawasan tersebut tampak mengular pada Senin pagi. Bahkan, mereka terjebak kemacetan hampir satu jam lamanya.

Kemacetan tersebut dipicu karena adanya perbaikan ruas jalan. Setengah ruas jalan sedang dilakukan pengecoran.

Sejumlah warganet mengeluhkan kondisi kemacetan tersebut. Ada juga netizen yang meminta pengendara untuk bersabar, karena perbaikan jalan untuk kepentingan bersama.

"Tid lewat sini. Macet kan ya. Antri kan ya. Trs di klaksonin. Lah trs saya harus terbang gt biar yg belakang sy bs pd lewat?? Heran," tulis komentar @tennyfk dalam postingan di salah satu akun Instagram.

"Sabar aja... lg di bagusin jalan nya... dan harus tertib berlalu lintas, jangan saling serobot..." tulis @arycheeseblak.

Ada salah satu netizen yang memberikan saran jalur alternatif untuk menghindari kemacetan tersebut. Jika ingin menuju Perempatan McDonald's Shinta, disarankan melintasi Jalan Raya Beringin. "Kalau mau ke arah pinangasia atau ke arah tol mendingan lewat jalan baru via jalan betet raya nanti tembus di jl lingkar palay semi," tulis saran @wahyuu.p.

Namun, saran tersebut ditanggapi netizen lain yang menyebut bahwa tidak ada jalur alternatif, karena jalan tersebut juga macet.

"Sama aja, sama2 macet juga... karna sedang ada galian buat trotoar... beringin raya tadi pagi macet parah," tulis komen @ingwdhs. ● pp

## BPKAD Banten Raih Juara Pertama Dalam Bidang Tata Kelola Pemerintah

**SERANG (IM)**- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten mendapatkan penghargaan dari Pj Gubernur Banten, Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, KP3R Gurug, Kota Serang.

BPKAD Provinsi Banten mendapatkan juara pertama dalam bidang tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Penghargaan itu diterima langsung oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti dalam acara Penganugerahan Lomba Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Banten.

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, pembangunan di Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh OPD di lingkup Pemprov dilakukan secara sistematis, koordinatif, sinergis, dan inovatif sesuai kesepakatan dan komitmen bersama antar seluruh stakeholder. "Sehingga kegiatan pembangunan ini akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten. Perlu langkah inovatif dari seluruh elemen organisasi agar upaya pengentasan permasalahan atau pun optimalisasi sumber daya yang ada sehingga perwujudan kesejahteraan tersebut dapat lebih

akseleratif?" Lanjut Al Muktabar menuturkan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten. "Hari ini adalah bagian dari reformasi birokrasi. Karena pada dasarnya prinsip-prinsip azas akuntabilitas, efektif, efisien, dan transparan adalah bagian yang harus kita lakukan bersama sebagai aparatur sipil negara," ungkap Al Muktabar, Senin (31/10).

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti berharap, penghargaan yang diterima BPKAD Provinsi Banten ini menjadi catatan positif. Sehingga ke depannya dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang baik. "Agar tata kelola pemerintahan khususnya pada tata kelola keuangan dan aset lebih akuntabel, efisien dan efektif sesuai kaidah-kaidah dan azas pengelolaan keuangan daerah," ujar Rina. "Semoga raih prestasi ini menjadi penyemangat kita semua, untuk memberikan kontribusi pengabdian, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah," ujar Rina. ● pra

## Pembakaran Sampah di TPS Ilegal di Tangerang Bakal Disetop

**TANGERANG (IM)**- Sejumlah warga RW 10, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten mengeluhkan dampak dari pembakaran sampah di tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal yang berlokasi di dekat permukiman. Pemerintah setempat berjanji segera melakukan pemberhentian kegiatan pembakaran sampah dan mencari solusi untuk pembuangan sampah yang sekitar.

Pada Senin (31/10) siang, asap tampak menguar dari lokasi tempat pembuangan sampah di dekat permukiman warga di kawasan RW 10 Kelurahan Karang Timur. Beberapa pemulung tampak sibuk mencari paku, besi, kaca, hingga kain yang dianggap masih bisa dimanfaatkan.

Sementara sampah-sampah yang tidak berguna langsung dibakar oleh pekerja. Tiap hari, warga sekitar terpaksa harus menghirup asap hasil pembakaran sampah tersebut. Berdasarkan penuturan warga sekitar, lahan yang dijadikan lokasi pembuangan dan pembakaran sampah warga tersebut sudah beroperasi selama belasan

tahun. Sebagian warga mengaku telah terbiasa dengan aktivitas pembuangan dan pembakaran sampah di titik tersebut dengan mengambil peruntungan dari sampah yang masih berguna. Tapi lebih banyak warga yang mengeluhkan dampak pencemaran udara dari hasil pembakaran.

Nian (65), salah satu warga Karang Timur yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi tempat pembuangan sampah mengaku sangat resah dengan kondisi itu. "Terutama lantaran asap dari pembakaran sampah yang sepanjang hari masuk ke rumahnya dan terhirup.

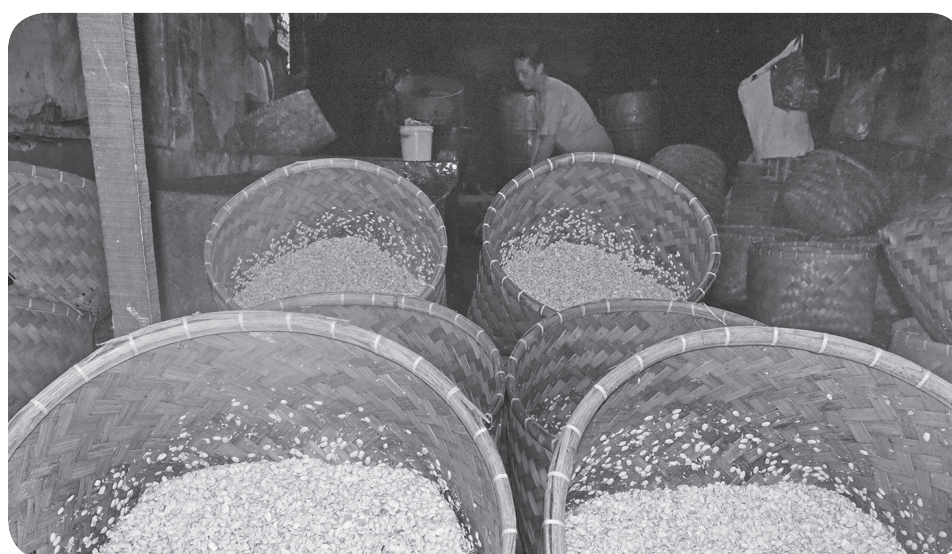
"Yang paling bikin terganggu itu adalah pembakarannya. Warga mengeluh, sudah pasti asapnya masuk ke rumah. 24 jam kegiatannya (pembakaran sampah)," ujar Nian saat ditemui di kediamannya di kawasan Karang Timur, tidak jauh dari lokasi tempat pembakaran sampah, Senin (31/10).

Nian mengaku dirinya serta warga-warga lainnya telah melakukan pengaduan kepada pemerintah setempat untuk segera memberhentikan aktivitas pembakaran sampah karena dinilai ilegal. Pengaduan itu hingga saat ini belum membuahkan hasil.

"Kami mengadu untuk jangan lagi ada aktivitas pembuangan sampah dan pembakarannya. Kami sudah protes sebenarnya, ke RT, RW, lurah, sampai akhirnya ke website Pemerintah Kota Tangerang. Pengaduan kami melalui website itu ditindaklanjuti dengan pihak Pemkot Tangerang dan lurah datang ke lokasi sekitar 10 hari yang lalu. Lurah berjanji menertibkannya, tapi belum ada action sampai sekarang," ujar dia.

Menurut penuturan Nian, sampah yang terkumpul dan dibakar di titik tersebut memang merupakan sampah dari warga sekitar, termasuk dirinya. Para warga membayar uang iuran sampah secara rutin per bulannya. "Sampah diangkut gerobak, kami bayar Rp50 ribu per bulan. Sampah dibawa ke situ, lalu pemulung menyortir sampah yang bisa dimanfaatkan, baru dibakar," kata dia.

Meski sudah melakukan berbagai upaya pengaduan, hingga saat ini kegiatan pembakaran masih terus berlangsung. Hal itu membuat Nian dan banyak warga lainnya di sekitar TPS ilegal tersebut semakin gelisah karena tidak ada aksi nyata untuk menghentikan kegiatan pembakaran. ● pp



IDN/ANTARA

## HARGA KEDELAI NAIK

Pekerja mencuci kedelai di pabrik tempe Kejayan di Kampung Pejaten, Kramatwatu, Serang, Banten, Senin (31/10). Menurut pengusaha tempe, harga kedelai naik dari Rp12.300 menjadi Rp13.800 perkilogram akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebab sebagian besar kedelai masih diimpor dari luar negeri.

## Tolak Relokasi Makam Syekh Buyut Jenggot

**TANGERANG (IM)**- Sekelompok orang menggelar aksi di Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Senin (31/10). Sekelompok orang tersebut merupakan beberapa warga dari Parungganggan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Mereka melakukan aksi menolak relokasi makam Syekh Buyut Jenggot atau Syekh Tubagus Rajasuta bin Sultan Ageng Tirtayasa. Sebagaimana diketahui, lokasi makam Syekh Buyut Jenggot rencananya akan diubah menjadi perumahan oleh sebuah perusahaan swasta.

Peserta aksi sudah mulai berdatangan sejak pukul 10.00 WIB. Sebagian dari mereka menurunkan ribuan bendera kuning dari dalam mobil. Sedangkan beberapa orang lainnya membawa bendera kuning itu dan memasangnya di pagar halaman Puspemkot Tangerang. Seribu lebih bendera kuning itu juga ditanam di tanah karena badan pagar tidak kuat lagi. Puluhan bendera kuning juga dibagikan kepada ratusan peserta aksi.

Koordinator aksi Syaiful Basri mengungkapkan, bendera kuning yang dibuat dan dipasang merupakan simbol kematian. Simbol kematian yang dimaksudkan adalah rasa peduli dan perhatian dari pemerintah daerah atas perkara ini.

"(Bendera kuning itu) ya artinya pemerintah itu sudah tidak lagi berpihak kepada masyarakat. Matinya keberpihakan pemerintah kota Tangerang terhadap aspirasi masyarakat dan persoalan-persoalan masyarakat," kata Syaiful Basri yang akrab disapa Marsel di depan Puspemkot Tangerang, Senin.

Sementara itu, beberapa peserta aksi terlihat sibuk memasang tenda. Satu tenda besar tanpa dinding dan dua lainnya tenda camping. Ketiga tenda itu rencananya akan menjadi tempat para peserta aksi menginap selama lima hari di sana.

Mereka akan melakukan tahlil akbar, orasi serta menyampaikan argumentasi-argumentasi mereka sampai ada kepastian atau pernyataan sikap resmi dari Pemerintah Kota Tangerang. Hari ini, mereka baru memulai orasi sekitar pukul 13.30 WIB setelah bersantap siang mengisi tenaga yang habis saat mempersiapkan berbagai keperluan aksi sejak kemarin. "Aksi kita tidak hanya hari ini kita melakukan aksi Senin sampai Jumat dengan agenda tahlil akbar, dan kita juga akan buka ruang aspirasi," ucap Marsel.

Adapun tujuan aksi yang mereka lakukan yakni agar makam Syekh Buyut Jenggot tidak direlokasi atas alasan apapun, sekalipun saat ini makam tersebut sudah ditetapkan sebagai bukan cagar budaya. Untuk diketahui, Dirjen Kebudayaan melalui surat Nomor: 2294/F4/KB.09.01/2022 Direktorat Jenderal Kebudayaan memutuskan bahwa Makam Syekh Buyut Jenggot tidak direkomendasikan sebagai cagar budaya pada 25 Oktober 2022.

"Terkait keputusan dari pada penetapan balai cagar budaya yang tidak menetapkan Syekh Buyut Jenggot sebagai situs cagar budaya buat kami tidak persoalan," kata dia. "Tujuannya pemerintah agar makam syekh Buyut Jenggot tidak direlokasi ke mana pun, karena ketika makam Syekh Buyut Jenggot direlokasi, ini akan menghilangkan sejarah," tambah Marsel.

Menurut Marsel, sejarah mengenai makam Syekh Buyut Jenggot ini sudah terbangun di masyarakat sejak ratusan tahun lalu. Selain itu, makam juga sudah menjadi bagian dari kearifan lokal karena ritual ziarah yang dilakukan masyarakat sekitar bahkan masyarakat di luar Pulau Jawa. ● pp

## Air Laut Pasang, Ratusan Keluarga di Teluknaga Terendam Banjir Rob

**TANGERANG (IM)**- Ratusan kepala keluarga di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, terendam banjir rob akibat air laut pasang dalam sepekan terakhir. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tangerang, Abdul Munir menerangkan, saat ini warga masih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing.

Pihaknya mengaku telah menyiapkan personel jika warga membutuhkan bantuan evakuasi. "Semua masih di rumahnya masing-masing. Airnya setinggi 20-30 cm mengganggu aktivitas sehari-hari warga saja," jelas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tangerang, Abdul Munir, Senin (31/10).

Dia menegaskan petugas perahu karet dan tempat pengungsian sementara telah disiapkan. Namun, banjir Rob yang dianggap rutin terjadi, membuat warga enggan meninggalkan rumah mereka.

"Untuk rob saat ini merendam warga di RT001/001 dan RT002/002, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga. Dengan total jumlah kepala keluarga sebanyak 220 KK.

"RT 01/02 jumlah KK 95 dan RT 01/01 jumlah KK 125. Dan kejadian rob ini sudah empat hari berlangsung dan masuk melalui kali yang ada di belakang kampung tersebut dan masuk ke perkampungan hingga ke jalan Raya Tanjung Pasir," jelas dia.

Namun menurut Munir, peristiwa pasangannya air laut itu terjadi setiap pukul 10-11.00 WIB setiap harinya. "Lalu akan surut kembali antara pukul 16.00 - 18 : 00 WIB, sehingga banjir air laut pasang ini menggenangi rumah warga kurang lebih selama 7 jam," terang Munir. ● pp



IDN/ANTARA

## PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI

Seorang murid pendidikan anak usia dini (PAUD) mengikuti pembelajaran menggunakan gim edukasi di Paud Sanggar Cerdas Elina, Tangerang Selatan, Banten, Senin (31/10). Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong pendidikan berbasis teknologi pada jenjang PAUD hingga perguruan tinggi sebagai upaya pemulihan pendidikan usai pandemi.

## Proyek Pembangunan Flyover Cisauk Ditargetkan Rampung 13 Bulan

**TANGERANG (IM)**- Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan pencairan tiang pertama (groundbreaking) proyek pembangunan jembatan layang atau flyover Cisauk.

Pembangunan fasilitas flyover tersebut disebut sebagai salah satu upaya meminimalisasi kemacetan di Kecamatan Cisauk. Pembangunan ini ditargetkan rampung selama 13 bulan atau 395 hari. Flyover ini sepanjang 1.090,67 meter (flyover dan jalan), dengan panjang struktur jembatan sepanjang 216 meter dan lebar jalur 5,5 meter yang dibuat 2 jalur dengan 2 arah.

"Memang pembangunan yang masuk proyek strategis ini tertunda, karena sebelumnya fokus untuk penanganan di sektor kesehatan dan juga sektor ekonomi akibat pandemi pada

2020, namun pada tahun ini kita (Pemerintah Daerah) kembali membenahi sisa-sisa kegiatan yang belum dilaksanakan termasuk pembangunan flyover ini," ujar Kepala Dinas DBMSDA Kabupaten Tangerang, Iwan Firmansyah, Senin (31/10).

Dengan adanya jembatan layang, diharapkan antrian kendaraan di perlintasan Kecamatan Cisauk teratasi. Begitu juga dengan perlintasan kereta api yang setiap 15 menit sekali harus ditutup karena KRL lewat, ini yang cukup mengganggu lalu lintas kendaraan.

"Diharapkan pembangunan flyover ini bisa mengurai kemacetan di wilayah Cisauk yang memang sudah lama menjadi faktor utama sumber kemacetan yang terjadi di kawasan tersebut selama ini," pungkasnya. ● pp